

Peran Strategis TPID Klungkung dalam Pengendalian Harga Pangan Pokok Daerah

(The Strategic Role of TPID Klungkung in Controlling Regional Staple Food Prices)

Ni Putu Krisnanda Sukma Padmayoni^{1*}, Ni Putu Tirka Widanti², Nyoman Diah Utari Dewi³

Universitas Ngurah Rai, Bali, Indonesia^{1*,2,3}

krisnandasukmapadmayoni@gmail.com^{1*}, tirka.widanti@unr.ac.id², diah.utari@unr.ac.id³



Riwayat Artikel

Diterima pada 23 Desember 2024

Revisi 1 pada 05 Januari 2025

Revisi 2 pada 14 Januari 2025

Revisi 3 pada 22 Januari 2025

Disetujui pada 28 Januari 2025

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the role of the Regional Inflation Control Team (Tim Pengendalian Inflasi Daerah/TPID) in Klungkung Regency in stabilizing the prices of essential commodities and controlling inflation. It also identifies the specific strategies implemented to maintain staple food price stability at the regional level.

Methodology/Approach: This study adopts a qualitative descriptive approach. Data were gathered through direct observation, in-depth interviews with stakeholders, and document analysis, focusing on TPID's activities related to inflation control and food price stabilization.

Results/Findings: The findings indicate that TPID Klungkung executed eight strategic measures: (1) market operations, (2) price monitoring, (3) coordination of supply and distribution, (4) promotion of community-based planting, (5) development of regional food reserves, (6) improvement of public communication, (7) encouragement of local product consumption, and (8) logistics system enhancement. These actions have contributed significantly to maintaining price stability and protecting consumer purchasing power, especially among low-income groups.

Conclusion : This study concludes that TPID Klungkung plays a critical and proactive role in controlling inflation. The integrated multi-stakeholder approach has strengthened food security and regional economic resilience. This model serves as a best practice for other regions that face similar issues.

Limitations: The study was limited by varied respondent interpretations during interviews and constrained access to some key informants, potentially affecting data depth and consistency.

Contribution: This study contributes to a deeper understanding of regional inflation control mechanisms and provides practical insights for policymakers and stakeholders in designing effective community-driven economic strategies.

Keywords: *Basic Commodities, Inflation, Price Control Policies, Role of Inflation Control Team.*

How to Cite: Padmayoni, N, P, K, S., Widanti, N, P, T., Dewi, N, D, U. (2025). Peran Strategis TPID Klungkung dalam Pengendalian Harga Pangan Pokok Daerah. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 4(2), 107-119.

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam keberhasilan pembangunan suatu wilayah, termasuk dalam upaya menekan laju inflasi. Boediono (2012:69) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Dalam konteks ini,

pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) tanpa memandang seberapa besar pertumbuhannya dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk, serta apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak. Menurut Sukirno (2016), pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui PDB yang mencerminkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara atau daerah dalam periode tertentu. Inflasi, sebagai fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka panjang, menjadi tantangan serius yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi daerah.

Kabupaten Klungkung, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Bali, turut menghadapi tantangan dalam mengendalikan inflasi, khususnya yang berasal dari kelompok bahan pangan pokok. Ketergantungan Klungkung terhadap pasokan pangan dari luar daerah menjadikannya rentan terhadap fluktuasi harga. Gangguan distribusi, kelangkaan pasokan, atau kenaikan harga dari daerah penghasil seperti Bangli dapat berdampak langsung pada masyarakat Klungkung. Kenaikan harga komoditas seperti beras, minyak goreng, telur, dan sayur-mayur dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Kondisi ini, jika tidak ditangani secara cepat dan tepat, berpotensi menimbulkan instabilitas sosial dan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Menyadari pentingnya pengendalian inflasi sebagai bagian dari menjaga stabilitas ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Klungkung telah mengambil langkah strategis melalui pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). TPID Kabupaten Klungkung dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 348/01.3/HK/2024 sebagai respon terhadap tingginya tekanan inflasi pangan. Tim ini berperan dalam melakukan koordinasi lintas sektor, memantau ketersediaan dan harga bahan pokok, serta merumuskan kebijakan yang efektif dan adaptif dalam menjaga kestabilan harga. Pembentukan TPID juga merupakan bagian dari kebijakan nasional yang dimulai pada tahun 2005 dengan pembentukan Tim Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat, kemudian diperluas ke tingkat provinsi pada 2008, dan selanjutnya hingga tingkat kabupaten/kota.

TPID Klungkung menjadi garda terdepan dalam merespon dinamika inflasi lokal melalui langkah-langkah proaktif, seperti pelaksanaan pasar murah, monitoring harga, operasi pasar, dan sinergi dengan daerah penghasil. Selain itu, strategi penguatan ketahanan pangan lokal dan peningkatan efisiensi distribusi menjadi prioritas kebijakan daerah dalam menekan dampak inflasi. Dengan pendekatan yang bersifat kolaboratif dan berbasis data, TPID diharapkan mampu menjaga kestabilan harga, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Klungkung.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan (Soekanto, 2012:244) yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan.

Adapun penelitian terdahulu yang menurut penulis relevan dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain penelitian yang berjudul Analisis Peranan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Terhadap Perekonomian Dumai (Mahmud, 2018). Dengan hasil penelitian ini adalah peran tim pengendalian

inflasi daerah adalah mengevaluasi sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi serta dampaknya terhadap pencapaian target inflasi dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditempuh dalam rangka pengendalian inflasi sehingga dapat meningkatkan daya beli dan menghambat laju pertumbuhan penduduk miskin di Kota Dumai.

Analisis Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Banda Aceh Dalam Pengendalian Inflasi (Nurhasanaton dkk, 2023). Hasil penelitian menunjukkan Peran TPID Kota Banda Aceh berperan aktif dimana TPID melakukan operasi pasar murah, melakukan penguatan cadangan pangan, melakukan integrasi update data harga pangan, peningkatan kehandalan TPID melalui pembinaan. Optimalisasi Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Palembang dalam Pengendalian Inflasi di Kota Palembang (Vetria, 2024). Hasil penelitian terlihat bahwa sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci sukses dalam pengendalian inflasi di Kota Palembang. Analisis Dampak Pengendalian Inflasi Terhadap Tingkat Inflasi Daerah Kota Cirebon (Maulida, 2024). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan strategi yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Kota Cirebon dalam mengendalikan tingkat inflasi di Kota Cirebon berdampak positif dan relatif stabil.

Penelitian Rafiq dkk, (2023) berjudul Pengaruh Komunikasi, Insentif Daerah dan Kerjasama Tim Terhadap Kinerja Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maneje Tahun 2022 dengan hasil penelitian yaitu bahwa komunikasi berpengaruh positif terhadap kinerja anggota tim pengendalian inflasi daerah pada sekretariat daerah kabupaten majene, insentif daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggota tim TPID pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majene, kerjasama tim berpengaruh positif terhadap kinerja anggota tim TPID pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majene, terdapat pengaruh positif dan signifikan komunikasi, insentif daerah dan kerjasama tim secara bersama-sama (simultan) terhadap kinerja anggota tim TPID pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majene, variabel insentif daerah yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja anggota tim TPID pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majene.

Penelitian berjudul Studi Literatur Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah di Indonesia (Prihadyatama & Kurniawan, 2022). Dengan hasil penelitian menunjukkan pentingnya koordinasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi daerah. Peran Pemerintah Kabupaten Bondowoso Dalam Mengendalikan Inflasi (Farisi, 2023). Hasil penelitian menunjukkan pemerintah daerah bondowoso selalu memantau laju inflasi serta mengendalikan inflasi dengan menerapkan strategi-strategi dalam mengendalikan inflasi di daerah bondowoso diharapkan kota bondowoso dalam laju inflasinya menjadi lebih turun.

Analisis Peran Hukum dan Ekonomi Makro Terhadap Inflasi Kota Bandung Tahun 2020 (Kartikawati, 2023). Dalam perspektif ekonomi makro, peran hukum sangat penting dalam mengatur kebijakan perekonomian untuk menekan inflasi. Di Kota Bandung, kebijakan yang dilakukan antara lain pengendalian harga-harga barang, perluasan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan pengawasan kebijakan moneter. Oleh karena itu, penerapan hukum dan peraturan yang tepat sangat diperlukan untuk menciptakan kestabilan perekonomian di Kota Bandung dan Indonesia pada umumnya.

Efektivitas Pasar Murah Dalam Menstabilkan Harga Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Sumiyati dkk, 2025). Dilihat dari pertama, pada aspek pemahaman program meliputi sosialisasi pemahaman terkait tujuan dari pelaksanaan Program Pasar Murah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak efektif karena hanya dilakukan rapat dari Dinas Perindag di kantor Kelurahan di desa yang akan dilaksanakan Program Pasar Murah tersebut. Kedua, pada aspek tepat waktu meliputi adanya target waktu yang ditentukan cukup baik dan ketepatan waktu pelaksanaan Program Pasar Murah sudah sesuai dengan tahapan yang ditentukan. Ketiga, pada aspek tercapainya tujuan meliputi pencapaian Program Pasar Murah Dalam Menstabilkan Harga Di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum efektif karena dilihat masih Masih banyaknya masyarakat yang kurang mampu kesulitan dalam memperoleh barang dengan harga yang wajar. Keempat, pada aspek perubahan yang nyata meliputi dampak yang didapatkan masyarakat masih belum efektif dikarenakan terbatasnya waktu pelaksanaan program dan jumlah bahan

pokok yang disediakan pada Pasar Murah Kelima, pada aspek tepat sasaran meliputi objek sasaran Program Pasar Murah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dinilai tepat.

Keterlibatan Masyarakat Dalam Kolaborasi Pengendalian Inflasi (Primastuti dkk, 2023). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam kolaborasi publik untuk mengendalikan inflasi adalah hal yang penting karena dapat mengoptimalkan capaian yang ingin dituju dari kolaborasi, dalam hal ini adalah terkendalinya inflasi. Tingkat keterlibatan masyarakat yang diinginkan dalam membuat keputusan (kebijakan) tergantung pada atribut masalah inti, beberapa masalah menuntut lebih banyak keterlibatan, yang lain menuntut lebih sedikit atau lebih banyak.

Strategi Pengendalian Inflasi Melalui Pemetaan Pola Distribusi Komoditas Kebutuhan Pokok Masyarakat Kota Depok (Lubis & Octavia, 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan struktur distribusi di pasar tradisional dan modern mempengaruhi harga dan ketersediaan komoditas. Pasar tradisional cenderung menghadapi tantangan dalam rantai pasok, seperti biaya transportasi yang tinggi dan fluktuasi stok, sedangkan pasar modern lebih stabil namun dipengaruhi oleh kebijakan harga pusat. Untuk mengendalikan inflasi, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, distributor, dan pedagang dalam memperbaiki infrastruktur distribusi, memperpendek rantai pasok, serta mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pemantauan harga.

Mewujudkan Stabilitas Harga Melalui Pasar Murah: Pengalaman Bulog di Sidenreng Rappang (Herman dkk 2024). Hasil utama menunjukkan bahwa pasar murah berhasil menjual beras, gula, dan minyak goreng dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar, yang masing-masing mencapai 1.500 kg, 500 kg, dan 400 liter. Manfaat yang diperoleh meliputi penurunan harga kebutuhan pokok di pasar lokal serta penghematan biaya untuk masyarakat, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Berdasarkan rangkaian penelitian terdahulu, dapat dikembangkan beberapa hipotesis terkait dengan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam pengendalian inflasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengembangan hipotesis ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai efektivitas dan peran kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku ekonomi dalam mengendalikan inflasi di tingkat daerah, antara lain:

1. Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat inflasi di suatu daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mahmud, (2018) dan Nurhasanatan dkk, (2023), TPID memiliki peran yang sangat penting dalam menurunkan tingkat inflasi melalui berbagai kebijakan seperti operasi pasar murah, penguatan cadangan pangan, dan integrasi data harga pangan. Oleh karena itu, hipotesis pertama menyatakan bahwa semakin aktif dan efektif TPID dalam melaksanakan tugasnya, semakin rendah tingkat inflasi di daerah tersebut.
2. Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat akan meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian oleh Vetricia (2024), sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat di Kota Palembang terbukti menjadi kunci sukses dalam pengendalian inflasi. Dengan demikian, hipotesis kedua menyatakan bahwa kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak akan meningkatkan efektivitas kebijakan pengendalian inflasi.
3. Peningkatan komunikasi, insentif daerah, dan kerjasama tim berpengaruh positif terhadap kinerja TPID dalam mengendalikan inflasi. Berdasarkan hasil penelitian oleh Rafiq dkk, (2023) komunikasi, insentif daerah, dan kerjasama tim secara bersama-sama memberikan pengaruh positif terhadap kinerja TPID. Hipotesis ini mengasumsikan bahwa semakin baik komunikasi antar anggota tim, semakin besar insentif yang diterima, dan semakin solid kerjasama antar pihak yang terlibat, maka semakin optimal pula pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID.
4. Program pasar murah memiliki dampak yang signifikan dalam menstabilkan harga dan mengurangi inflasi di daerah tertentu. Penelitian Sumiyati dkk, (2025) mengindikasikan bahwa meskipun program pasar murah memiliki beberapa kekurangan, pada aspek tertentu seperti waktu pelaksanaan dan ketepatan sasaran, program ini berpotensi membantu menstabilkan harga. Hipotesis ini berargumen bahwa program pasar murah yang dikelola dengan baik dapat efektif dalam menstabilkan harga barang pokok, sehingga berkontribusi pada pengendalian inflasi.

5. Keterlibatan masyarakat dalam kolaborasi pengendalian inflasi dapat mempercepat tercapainya target inflasi yang diinginkan. Berdasarkan penelitian Primastuti dkk, (2023), keterlibatan masyarakat dalam pengendalian inflasi terbukti penting untuk mengoptimalkan hasil yang diinginkan. Hipotesis ini berargumen bahwa semakin besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan, semakin efektif pengendalian inflasi yang dapat tercapai.
6. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berpengaruh positif terhadap pengendalian inflasi di daerah. Berdasarkan penelitian Prihadyatama & Kurniawan (2022) koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam pengendalian inflasi. Hipotesis ini menyatakan bahwa peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar tingkat pemerintahan akan memperkuat kebijakan pengendalian inflasi di tingkat daerah, dan berdampak positif pada stabilitas harga.

Berdasarkan studi pustaka dan penelitian-penelitian sebelumnya, diketahui bahwa peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara umum telah banyak dibahas dalam konteks pengendalian inflasi di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Mahmud (2018) dan Nurhasanatan dkk (2023) menunjukkan bahwa TPID memiliki kontribusi signifikan dalam mengendalikan inflasi melalui berbagai program seperti pasar murah dan penguatan cadangan pangan. Sementara itu, studi lain seperti Rafiq dkk (2023) lebih menyoroti faktor-faktor internal seperti komunikasi, insentif, dan kerjasama tim yang mempengaruhi efektivitas kinerja TPID.

Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat umum dan tidak secara khusus menelaah konteks geografis dan struktural yang unik, seperti yang terjadi di Kabupaten Klungkung, Bali. Kabupaten ini memiliki karakteristik wilayah yang terdiri dari daratan dan kepulauan (Nusa Penida), yang menyebabkan tantangan logistik dan distribusi bahan pangan yang berbeda dengan daerah lainnya. Kondisi ini belum banyak diangkat dalam studi sebelumnya, terutama dalam melihat bagaimana TPID merespons hambatan distribusi antar wilayah dan ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.

Selain itu, beberapa penelitian seperti Vetrica (2024) dan Lubis & Octavia (2025) memang menyinggung pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, serta pentingnya distribusi yang efisien. Namun, belum ada kajian yang secara mendalam mengaitkan strategi pengendalian inflasi dengan topografi wilayah, kapasitas kelembagaan TPID lokal, dan keterlibatan masyarakat di wilayah yang rentan secara geografis seperti Klungkung.

3. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan objek dan masalah penelitian sedetail mungkin berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan informasi dari informan maupun kata-kata tertulis yang diamati sehingga mengetahui maksud dari penelitian tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan praktik-praktik yang dilakukan oleh anggota TPID serta pihak-pihak terkait lainnya (Creswell, 2014). Teknik pengumpulan data dari penelitian ini bersumber dari observasi dan wawancara mendalam. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Menurut (Sugiyono, 2018:145), observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pengamatan secara sistematis terhadap gejala yang dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Penelitian dilakukan melalui pengamatan langsung ke objek penelitian yaitu peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam menstabilkan harga bahan pokok di Kabupaten Klungkung dengan cara melihat, mewawancarai, mencatat secara sistematis terhadap unsur-unsur, gejala-gejala dan tingkah laku aktual pada objek yang diteliti untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.

2. Wawancara

Sugiyono (2018), memaparkan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti dan juga untuk mendalami permasalahan yang diteliti dengan jumlah responden yang kecil. Wawancara juga merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk

mendapatkan informasi secara lisan melalui tanya jawab, yang berhadapan langsung dengan sejumlah informasi yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini yang di jadikan narasumber untuk di wawancarai yakni Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klungkung sebanyak 3 orang, Pihak Pelaksana Program di Lapangan dan Masyarakat setempat

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder dengan cara mencatat data-data, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan atau arsip-arsip yang berkaitan dengan objek penelitian demi kesempurnaan dalam melakukan Analisa (Sugiyono, 2018:147).

4. Hasil dan Pembahasan

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klungkung mulai dilaksanakan pada tahun 2019 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klungkung mulai diaktifkan pada tahun 2019 dan beroperasi di empat kecamatan, yaitu Banjarangkan, Klungkung, Dawan, dan Nusa Penida. Berdasarkan wawancara mendalam dengan Sekretariat TPID, ditemukan bahwa TPID Kabupaten Klungkung telah menjalankan berbagai program pengendalian harga seperti pasar murah, monitoring harga, koordinasi antar daerah, dan gerakan menanam. Program-program ini diarahkan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) atau saat gangguan pasokan terjadi.

Jika ditinjau dari teori peran menurut Soekanto (2012), pelaksanaan TPID di Klungkung dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama:

1. Peranan sebagai norma sosial,
2. Peranan sebagai konsep posisi dalam organisasi, dan
3. Peranan sebagai perilaku yang mendukung struktur sosial.

TPID dalam hal ini berfungsi sebagai struktur organisasi pemerintahan daerah yang bertugas menerjemahkan kebijakan pengendalian inflasi nasional ke dalam bentuk program konkret di tingkat lokal. Hal ini mencerminkan peranan normatif dan institusional. Dalam pelaksanaannya, TPID juga menunjukkan perilaku adaptif, seperti bekerja sama lintas sektor dan menyesuaikan strategi dengan kondisi geografis (seperti Nusa Penida yang merupakan wilayah kepulauan dengan tantangan distribusi tersendiri).

Temuan ini selaras dengan penelitian Nurhasanatur dkk (2023) yang menunjukkan bahwa TPID Banda Aceh menjalankan peran aktif melalui program pasar murah, penguatan cadangan pangan, dan integrasi data harga. Namun, TPID Klungkung menunjukkan kelebihan dalam konteks operasional geografis, di mana mereka tidak hanya menyelenggarakan pasar murah, tetapi juga memberikan subsidi ongkos angkut ke wilayah kepulauan. Ini merupakan strategi spesifik yang belum banyak diangkat dalam studi terdahulu, menjadikan Klungkung sebagai studi kasus menarik dalam konteks daerah kepulauan.

Dari sisi kolaborasi, strategi yang dilaksanakan TPID Klungkung juga mendukung temuan Vetricia (2024) mengenai pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Namun, dalam wawancara juga terungkap bahwa belum seluruh komponen masyarakat terlibat secara optimal, terutama dalam hal partisipasi langsung warga dalam program gerakan menanam atau pelaporan harga di pasar. Di sinilah terdapat kesenjangan antara teori dan praktik, karena dalam teori peran sosial, idealnya partisipasi publik menjadi komponen penting dalam memperkuat efektivitas kebijakan publik. Dalam hal efektivitas program, Sumiyati dkk (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan pasar murah sangat bergantung pada faktor waktu, ketepatan sasaran, dan keterjangkauan lokasi. Dalam konteks Klungkung, TPID telah mengatasi sebagian besar tantangan ini melalui pendekatan *mobile market* (pasar murah keliling), tetapi masih menghadapi kendala distribusi di wilayah terpencil dan keterbatasan volume barang.

Secara keseluruhan, TPID Kabupaten Klungkung dapat dikategorikan sebagai aktif dan progresif dalam menjalankan fungsinya, dengan inovasi seperti subsidi logistik dan pemetaan daerah rawan inflasi. Namun, bila dibandingkan dengan daerah lain seperti Kota Palembang (Vetricia, 2024) atau Cirebon (Maulida, 2024), TPID Klungkung masih memiliki ruang penguatan dalam hal manajemen data harga secara digital, serta peningkatan mekanisme pelaporan partisipatif dari masyarakat.

Kelemahan lainnya adalah kurangnya integrasi data secara real-time antara pemerintah daerah, pelaku pasar, dan masyarakat. Hal ini penting sebagai bentuk sistem peringatan dini (early warning system) untuk mendeteksi potensi lonjakan harga. Selain itu, kinerja TPID masih sangat tergantung pada inisiatif pemerintah daerah, belum sepenuhnya didukung dengan kebijakan yang berorientasi pada pembentukan jejaring kerja yang permanen dan berbasis komunitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan perihal peranan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klungkung, khususnya dalam wawancara yang dilakukan dengan sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), mengungkapkan bahwa TPID Kabupaten Klungkung sudah melaksanakan 8 upaya dalam mengendalikan inflasi. Upaya yang dilakukan antara lain:

1.1 Pasar Murah

Salah satu program pemerintah Kabupaten Klungkung dalam menstabilkan harga di pasaran adalah mengadakan Pasar Murah. Pasar Murah dilaksanakan secara berkala, baik secara terpusat maupun berpindah-pindah lokasi untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat di berbagai kecamatan di Kabupaten Klungkung. Sunarto, dkk (2024) Pasar murah ini berupa bantuan subsidi pemerintah terhadap beberapa jenis barang kebutuhan pokok masyarakat disalurkan dalam bentuk paket sembako. Pelaksanaannya dilakukan menjelang hari besar kagamaan seperti puasa, hari raya Idul fitri, hari raya Natal dan tahun baru Imlek. Program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan pokok yang terjangkau bagi masyarakat. Dampak ekonomi dari pasar murah sangat signifikan karena berhasil menurunkan harga kebutuhan pokok dan meringankan beban keuangan masyarakat berpenghasilan rendah (Samud, 2018).

Program pasar murah dilaksanakan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang ada di Kabupaten Klungkung, Bulog dan PT. Gied. Kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak-pihak tersebut bertujuan untuk memastikan pasokan bahan pangan pokok tetap terjaga, sementara harga tetap dapat dijangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang paling terdampak oleh fluktuasi harga.

Peran serta berbagai pihak dalam program Pasar Murah sangat penting untuk memastikan kelancaran pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Klungkung turut mendukung dalam hal pembiayaan operasional pasar murah, sementara Bulog bertanggung jawab dalam penyediaan stok pangan yang terjangkau bagi masyarakat. PT. Gied, sebagai pihak swasta yang berperan dalam distribusi bahan pangan, bekerja sama untuk memastikan bahwa produk-produk yang dijual di Pasar Murah memiliki kualitas yang baik dan harga yang bersaing. Tujuan utama dari Pasar Murah adalah untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga barang kebutuhan pokok yang dapat memberatkan masyarakat terutama menjelang hari-hari besar atau situasi tertentu yang dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga barang pokok.



Gambar 1. Kegiatan Pasar Murah di Kampung Kusamba, Kabupaten Klungkung
Sumber: Peneliti

Dalam pelaksanaannya, pasar murah menyediakan berbagai barang kebutuhan pokok yang dijual dengan harga lebih terjangkau karena sudah mendapat subsidi dari pemerintah. Beberapa komoditas yang dijual dalam pasar murah antara lain beras, minyak goreng, gula pasir, telur, bawang dan cabai.

Kegiatan ini diperuntukkan bagi masyarakat umum yang dilaksanakan pada setiap kecamatan secara bergilir. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari program ini. Menurut Nurzana & Novrianti (2024) dan Herman, dkk (2024). Dengan adanya pasar murah, masyarakat dapat menghemat pengeluaran untuk kebutuhan pokok, sehingga alokasi dana dapat digunakan untuk keperluan lain. Bagi keluarga dengan pendapatan rendah, hal ini sangat membantu dalam mengurangi beban ekonomi mereka.

Pelaksanaan pasar murah oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung, melalui koordinasi TPID, terbukti menjadi salah satu strategi yang efektif dan responsif dalam menstabilkan harga bahan pokok di tengah fluktuasi pasar. Efektivitas program ini bukan hanya terletak pada aspek teknis pelaksanaannya, melainkan juga pada kemampuannya dalam menjangkau lapisan masyarakat yang rentan secara ekonomi di seluruh wilayah administratif, termasuk daerah dengan keterbatasan akses seperti Nusa Penida.

Alasan mengapa pasar murah efektif di Klungkung adalah karena program ini menyesuaikan dengan pola konsumsi dan kalender ekonomi masyarakat lokal, yaitu dilaksanakan secara berkala menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), di mana permintaan terhadap bahan pokok cenderung meningkat. Pemberian subsidi langsung terhadap sembako dalam bentuk paket menjadi solusi konkret yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini juga mencerminkan prinsip tepat guna dan tepat sasaran. Dari perspektif kebijakan publik, efektivitas pasar murah di Klungkung juga dipengaruhi oleh faktor kolaboratif antar lembaga dan sektor, yang menjadi kekuatan utama TPID. Terlibatnya BPR, Bulog, dan PT. Gied dalam skema pendanaan, pengadaan stok, dan distribusi menunjukkan adanya kemitraan strategis antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan. Ini sejalan dengan temuan Vetria (2024) yang menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menekan inflasi daerah. Lebih jauh, keberhasilan TPID Klungkung juga dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci berikut:

1. Dukungan Kelembagaan dan Anggaran Daerah
Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi ongkos angkut dan penyediaan anggaran pasar murah dari APBD menegaskan dukungan struktural terhadap TPID. Hal ini menjadikan TPID bukan sekadar forum koordinasi, tetapi juga unit pelaksana kebijakan yang didukung secara nyata.
2. Adaptasi terhadap Kondisi Geografis
Wilayah Klungkung yang terdiri dari daratan dan kepulauan mendorong TPID untuk mengembangkan pendekatan yang fleksibel, seperti pasar murah berpindah-pindah lokasi, serta subsidi transportasi khusus untuk Nusa Penida. Ini adalah bentuk adaptasi kebijakan terhadap tantangan geografis lokal, yang sering kali tidak ditemukan dalam model TPID di daerah lain.
3. Monitoring dan Evaluasi Berkala
Kegiatan TPID tidak hanya berhenti pada implementasi, tetapi juga mencakup evaluasi harga dan distribusi barang. Monitoring harga di pasar-pasar tradisional memungkinkan deteksi dini terhadap gejolak harga, sehingga intervensi dapat dilakukan secara cepat dan terukur.
4. Partisipasi dan Respon Masyarakat
Tingkat respon masyarakat terhadap program pasar murah tergolong tinggi, terutama di wilayah dengan tingkat daya beli rendah. Partisipasi masyarakat ini memperkuat fungsi TPID dalam menjembatani kebutuhan rakyat dengan kebijakan yang bersifat subsidi langsung. Hal ini sesuai dengan penelitian Primastuti dkk (2023) yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam strategi pengendalian inflasi.

4.1 Monitoring Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting

Kegiatan monitoring ketersediaan bahan pokok dan barang penting dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan tujuan untuk memastikan pasokan barang-barang kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula, telur, daging dan bahan pangan lainnya agar tetap mencukupi dan terdistribusi dengan baik di seluruh wilayah Kabupaten Klungkung. Hal ini dilakukan untuk

mengidentifikasi kemungkinan adanya kelangkaan barang yang dapat memicu lonjakan harga. Dengan adanya monitoring yang rutin, TPID dapat mengidentifikasi dengan cepat adanya potensi kekurangan pasokan atau ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar.



Gambar 2. Kegiatan Monitoring Harga di Pasar Galiran Kabupaten Klungkung
Sumber: Peneliti

4.2 Operasi Pasar

Operasi pasar dan pasar murah tujuannya sama yaitu untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok atau sembako. Kedua program ini bertujuan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat. Namun, meskipun memiliki tujuan yang serupa, terdapat perbedaan mendasar dalam pelaksanaan dan sasaran dari kedua program tersebut. Operasi pasar lebih difokuskan untuk menangani masalah yang terjadi akibat perilaku tidak jujur atau praktik curang yang dilakukan oleh sejumlah pedagang yang nakal. Pedagang-pedagang ini seringkali terlibat dalam tindakan penimbunan barang, yang mana mereka sengaja mengumpulkan stok barang kebutuhan pokok dalam jumlah besar untuk dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi pada saat permintaan meningkat, terutama saat adanya hari raya seperti Galungan, Kuningan, atau Idul Fitri. Tindakan semacam ini tentu saja merugikan konsumen dan masyarakat luas, karena harga barang menjadi tidak terkendali dan membebani anggaran keluarga. Hal ini sama dengan laporan operasi pasar Kementerian Perdagangan (2015) yang menyatakan bahwa dampak dari operasi pasar dirasakan satu bulan setelah kegiatan.

4.3 Melaksanakan Penganangan Gerakan Menanam

Pencanangan gerakan menanam sebagai salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan bahan pangan yang sering kali terpengaruh oleh fluktuasi harga pasar. Gerakan menanam dilaksanakan oleh PKK Kabupaten Klungkung dengan memanfaatkan lahan yang tersedia untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan lokal yang mudah dibudidayakan seperti cabai, bawang, sayuran dan tanaman kebutuhan pokok lainnya.

4.4 Monitoring Harga

Kegiatan monitoring harga di Kabupaten Klungkung dilakukan secara rutin setiap hari kerja dengan tujuan untuk memastikan kestabilan harga barang kebutuhan pokok di pasaran. Tim teknis dari TPID secara langsung turun ke lapangan atau pasar-pasar yang tersebar di Kabupaten Klungkung untuk melakukan pemantauan harga. Data yang akurat dan terkini sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam pengendalian harga (Wibowo & Arifin, 2020). Selama proses monitoring harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klungkung tidak hanya mencatat harga barang, namun juga berinteraksi dengan para pedagang dan konsumen untuk memperoleh informasi langsung mengenai permasalahan yang ada di pasar.



Gambar 3. Kegiatan Monitoring Harga di Pasar Galiran, Kabupaten Klungkung
Sumber: Peneliti

4.5 Berkoordinasi dengan Daerah Penghasil Komoditi untuk Kelancaran Pasokan

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klungkung secara aktif berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan bahan pokok, yaitu dengan Kabupaten Bangli. Kabupaten Bangli merupakan salah satu daerah yang membantu memenuhi kebutuhan pasokan bawang di pasar-pasar di Kabupaten Klungkung. Dengan melakukan kerjasama antar daerah yang tujuannya menjaga ketersediaan komoditas pangan. Hal ini dilakukan dengan kerjasama terutama daerah defisit, dimana daerah tersebut memiliki ketersediaan komoditas dengan harga yang tidak stabil (Nurhasanaton, dkk (2023).

Memastikan kelancaran pasokan bawang dan komoditas lainnya, TPID Kabupaten Klungkung melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bangli, petani bawang lokal, serta pihak distributor di kedua wilayah yang menjadi perantara distribusi antara produsen dan pasar. TPID dapat memantau ketersediaan stok bawang dan bahan pangan lainnya di pasar, serta merespons dengan cepat jika terjadi lonjakan harga atau gangguan dalam rantai pasokan. Selain itu, TPID juga terus memonitor perkembangan harga dan pasokan bawang di kedua daerah ini melalui sistem pemantauan harga yang terintegrasi, guna memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat segera disesuaikan dengan kondisi pasar yang berkembang.



Gambar 4. Kegiatan Koordinasi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli dan Petani Bawang
Sumber: Peneliti

4.6 Memberikan Bantuan Transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pemerintah Kabupaten Klungkung memberikan bantuan transportasi melalui subsidi ongkos angkut yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai salah satu upaya untuk mendukung kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan menjaga kestabilan harga di pasaran. Pemberian subsidi ongkos angkut oleh pemerintah ini difokuskan pada bumdesma dan bumdes yang melakukan pendistribusian bahan pangan pokok ke Kecamatan Nusa Penida.

4.7 Rapat Teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Rapat Teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dihadiri oleh Tim Kebijakan dan Tim Teknis memiliki agenda penting dalam membahas tentang upaya-upaya yang telah dilakukan di Kabupaten Klungkung serta merencanakan jadwal dan lokasi kegiatan selanjutnya. Salah satu fokus utama dalam rapat ini adalah merumuskan strategi untuk mencegah adanya lonjakan harga yang dapat merugikan masyarakat, terutama menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) atau masa-masa tertentu yang rentan terhadap ketidakstabilan harga. Selain itu, rapat juga membahas potensi kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti BPR, Bulog, dan PT. Gieb, untuk memperluas cakupan pasar murah.

Peran TPID dalam pengendalian inflasi juga didukung oleh sinergi dengan pemerintah pusat, terutama dalam implementasi kebijakan moneter dan fiskal yang komprehensif. Sinergi antara TPID dengan Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan pengendalian inflasi dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi (Wahyudi, 2021).

5. Kesimpulan

Penelitian ini telah mengkaji peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klungkung dalam menstabilkan harga bahan pangan pokok yang merupakan kebutuhan vital masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran TPID Kabupaten Klungkung telah berjalan secara efektif. Hal ini terbukti dengan keberhasilan pelaksanaan berbagai program dan kebijakan yang mampu menahan laju inflasi, menjaga stabilitas harga, serta melindungi daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, pelaku usaha, serta dukungan aktif dari masyarakat. Koordinasi lintas sektor dan pelibatan berbagai pihak telah menjadi kunci utama dalam efektivitas kebijakan pengendalian harga di Kabupaten Klungkung. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya stabilitas harga serta peran mereka dalam mendukung program pemerintah juga turut memperkuat upaya pengendalian inflasi (Putri & Rahmawati, 2020).

Pengendalian inflasi yang dilakukan TPID Klungkung memberikan dampak nyata terhadap stabilitas ekonomi daerah. Tidak hanya menjaga harga tetap terkendali, kebijakan ini juga mendorong terciptanya rasa aman dan kepastian ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu, model pengelolaan inflasi berbasis kolaboratif dan adaptif yang diterapkan di Klungkung dapat dijadikan contoh atau best practice bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa, khususnya di wilayah dengan kondisi geografis yang kompleks atau memiliki ketergantungan pasokan dari luar.

Implikasi Kebijakan Praktis

1. **Penguatan Kapasitas Kelembagaan TPID**
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa TPID memiliki dukungan anggaran, data yang akurat, dan kapasitas sumber daya manusia yang memadai agar pengambilan kebijakan berbasis bukti dapat terus dilakukan secara berkelanjutan.
2. **Pengembangan Sistem Informasi Harga Terintegrasi**
Penting untuk mengembangkan sistem pemantauan harga berbasis digital yang real-time, agar intervensi pasar dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran, terutama dalam mengantisipasi lonjakan harga musiman.
3. **Perluasan Skema Subsidi Transportasi dan Logistik**
Mengingat wilayah Klungkung mencakup daerah kepulauan (Nusa Penida), subsidi ongkos angkut perlu diperluas tidak hanya saat pasar murah, tetapi juga untuk distribusi pangan rutin guna menekan disparitas harga antarwilayah.
4. **Peningkatan Literasi Masyarakat tentang Inflasi dan Harga**
Pemerintah daerah bersama TPID dapat menyelenggarakan edukasi publik mengenai dampak inflasi dan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung program pengendalian harga, sehingga partisipasi sosial semakin meningkat.

5. Replikasi Model Pasar Murah dan Gerakan Menanam di Daerah Lain

Keberhasilan Klungkung dalam menyelenggarakan pasar murah dan gerakan menanam berbasis lokal dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan di daerah lain dengan adaptasi sesuai konteks lokal masing-masing.

Mempertimbangkan implikasi-implikasi ini, diharapkan TPID tidak hanya menjadi unit koordinatif, tetapi juga sebagai motor utama dalam penguatan ketahanan ekonomi daerah dan stabilitas harga jangka panjang.

Limitasi dan studi lanjutan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu disampaikan sebagai bahan refleksi dan acuan untuk penelitian selanjutnya. Salah satu keterbatasan utama terletak pada proses wawancara yang merupakan metode utama dalam pengumpulan data. Dalam pelaksanaannya, peneliti terkadang mengajukan pertanyaan yang serupa namun dengan redaksi berbeda, yang dapat menimbulkan kerancuan makna bagi informan. Akibatnya, beberapa jawaban yang diberikan terkesan tidak konsisten atau mengalami pengulangan, sehingga berpotensi memengaruhi kedalaman dan keakuratan data yang diperoleh.

Selain itu, wawancara dilakukan dalam waktu yang terbatas, dan tidak semua pihak yang berperan strategis dalam pelaksanaan kebijakan TPID dapat dijangkau oleh peneliti, seperti pelaku usaha tingkat distribusi dan masyarakat penerima langsung manfaat. Keterbatasan ini berpengaruh terhadap cakupan perspektif yang dapat digali dari lapangan.

Untuk studi lanjutan, disarankan agar penelitian sejenis dilakukan dengan pendekatan mixed methods (kualitatif dan kuantitatif) guna memperkuat validitas data melalui triangulasi. Selain itu, studi lanjutan juga dapat memperluas fokus pada analisis dampak program TPID terhadap indikator ekonomi mikro, seperti perubahan daya beli masyarakat, efektivitas distribusi bahan pokok, atau indeks kepuasan penerima manfaat. Penelitian lebih lanjut juga penting untuk mengevaluasi kelangsungan dan keberlanjutan kebijakan TPID dalam jangka menengah dan panjang di tingkat daerah.

Ucapan terima kasih

Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan, tidak hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Klungkung.

Referensi

- Abdurrosyid, M., & Eldo, D. H. A. P. (2024). Analisis Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Perboto Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 4(1), 17–28. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v4i1.3212>
- Atika Supriadi, R., Widya Astuti, M., Darina, S., Frediani, I., & Noline Pigai, T. (2021). Analisis evaluasi kebijakan publik bantuan tunai: studi kasus bantuan tunai di provinsi Lampung. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 1(1), 25–42. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i1.209>
- Bank, Indonesia. (2022). *Laporan Perekonomian Indonesia 2022 : Sinergi dan Inovasi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Menuju Indonesia Maju*.
- Boediono. (2012). *Ekonomi Moneter Edisi 3*. BPF.
- Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 348/01.3/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design : Qualitative , Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed)*. <https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p40>
- Farisi, A. (2023). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dalam Mengendalikan Inflasi. *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(4), 867–871.
- Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, Muh. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Jangka. *Jurnal Studi Pemerintahan*

- Dan Akuntabilitas*, 1(1), 69–82. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i1.291>
- Hallatu, F., Soselisa, P. S., & Sakir, A. R. (2024). Analisis Kualitas Pelayanan Publik pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Yapono Kota Ambon. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 4(1), 43–54. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v4i1.3815>
- Herman, B., Askar, M., Darmawansyah, R., Nasir, R. M., Syamsunarti, N., Ikram, M., & Azis, M. (2024). Mewujudkan Stabilitas Harga Melalui Pasar Murah : Pengalaman Bulog di Sidenreng Rappang. *Madaniya*, 5(3), 844–850.
- Kartikawati, D. R. (2023). Analisis Peran Hukum dan Ekonomi Makro Terhadap Inflasi Kota Bandung Tahun 2020. *Jurnal Serambu Hukum*, 16(02), 134–140.
- Kementerian, P. (2015). *Laporan Akhir Analisis Efektivitas Operasi Pasar Beras*.
- Lubis, A. L. P., & Octavia, S. (2025). Strategi Pengendalian Inflasi Melalui Pemetaan Pola Distribusi Komoditas Kebutuhan Pokok Masyarakat Kota Depok. *IKRAITH EONOMIKA*, 8(1), 295–315.
- Mahmud, S. F. (2018). Analisis Peranan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Terhadap Perekonomian Dumai. *Unitex*, 11(1), 51–60.
- Maulida, R. (2024). *Analisis Dampak Pengendalian Inflasi Terhadap Tingkat Inflasi Daerah Kota Cirebon*.
- Nurhasanatanun, Usman, B., & Afrijal. (2023). Analisis Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Banda Aceh dalam Pengendalian Inflasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip USK*, 8(2), 1–10.
- Nurzana, F., & Novrianti. (2024). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Kenaikan Harga Pangan saat Mendekati Hari Raya Idul Fitri. *Jurnal Wilayah, Kota Dan Lingkungan Berkelanjutan*, 3(1), 178–185.
- Oktaviani, M., Yuswanto, Y., & Deviani, E. (2024). Implementation of Talent Pool System to Realize Professionalism Performance State Civil Apparatus. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 3(2), 83–92. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v3i2.3014>
- Prihadyatama, A., & Kurniawan, H. A. (2022). Studi Literatur Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah di Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(4), 238–264.
- Primastuti, A., Labolo, M., Sartika, I., & Akbar, B. (2023). Keterlibatan Masyarakat dalam Kolaborasi Pengendalian Inflasi. *Al Qalam : Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(4), 2319–2333.
- Putri, A. ., & Rahmawati, S. (2020). Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pengendalian Inflasi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(4), 110–123.
- Rafiq, M. I., Badaruddin, & Reynilda. (2023). Pengaruh Komunikasi, Insentif Daerah dan Kerjasama Tim Terhadap Kinerja Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pada Sekretariat Daerah kabupaten Majene Tahun 2022. *Jurnal Pelopor Manajemen Indonesia*, 2(2), 140–152.
- Rauf, A., & Andriyani, D. (2023). Analisis Implementasi Good Governance terhadap Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 2(2), 99–108. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v2i2.1850>
- Samud. (2018). Peranan Pemerintah dalam Menyejahterakan Masyarakat melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Amwal*, 10(2), 215–228. <https://doi.org/10.24235/amwal.v>
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar Pengertian*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : Alfabeta.
- Sukirno, S. (2016). *Mikroekonomi : Teori Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Sumiyati, Fahmi, Y., & Gunade, D. T. (2025). Efektivitas Pasar Murah dalam Menstabilkan Harga di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Pelayanan Publik*, 2(2), 569–577.
- Sunarto, N., Astuti, D., Enjeli, & Maisyarah, R. (2024). Analisis Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bengkalis. *Seminar Nasional Industri Dan Teknologi (SNIT), Politeknik Negeri Bengkalis*, 416–424.
- Vetria, S. (2024). Optimalisasi Peran Tim Penganggungan Inflasi Dearah (TPID) Kota Palembang dalam Penanggungan Inflasi di Kota Palembang. *Journal of Mandalika Social Science*, 2(1), 44–52.
- Wibowo, S., & Arifin, Z. (2020). Koordinasi Antar Instansi dalam Pengendalian Harga di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(3), 55–70.